

## Peran Bahasa Indonesia pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Meilina Widya Dali<sup>a\*</sup>, Sri Yuliani Saputri Paki<sup>b</sup>, Aprilia Misda Wati Karim<sup>c</sup>, Chelsea Florenzia Mahadewi<sup>d</sup>, Rahmi Djafar<sup>e</sup>, Hasra Mololonto<sup>f</sup>, Zaskia Chika Sukerta<sup>g</sup>, Obetsius Stive Kalangit<sup>h</sup>, Ahmad Kamal Pohontu<sup>i</sup>, Wahyu Ananta Lapananda<sup>j</sup>, Alief Qurrahman H. Saidi<sup>k</sup>, Mohamad Raditullah H. Sabah<sup>l</sup>, Andika Putra Pratama Rais<sup>m</sup>

*a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo  
email: [meilinawdali@ung.ac.id](mailto:meilinawdali@ung.ac.id)\*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 29 November 2025

Revised : 20 Desember 2025

Accepted : 27 Desember 2025

**Keywords:**

Language Indonesia; Local Regulation; Legal Certainty;

**Kata Kunci:**

Bahasa Indonesia; Peraturan Daerah; Kepastian Hukum;

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*Indonesian plays an important role in the creation of laws and regulations, including regional regulations, as the primary tool for formulating legal norms clearly, firmly, and without producing multiple interpretations. The Regional Regulation of Gorontalo Province as a regional legal product needs to be drafted in good, correct Indonesian, and in accordance with legal language rules in order to realize legal certainty in the implementation of regional government. This study aims to analyze the function of Indonesian in the Regional Regulation of Gorontalo Province, particularly in supporting the clarity of norms and legal certainty. The method used in this study is normative legal research that relies on an approach to legislation and a conceptual approach. The research findings indicate that the application of clear, consistent, and orderly Indonesian in regional regulations has a significant impact on the understanding of legal norms among government officials and the public. Appropriate legal language can avoid ambiguity, variations in interpretation, and the possibility of legal disputes in the implementation of regional regulations. Therefore, optimal use of Indonesian in regional regulations of Gorontalo Province is an important step to ensure legal certainty and increase the effectiveness of regional government implementation.*

### ABSTRAK

Bahasa Indonesia memiliki peran yang penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi daerah, sebagai alat utama untuk menyusun norma hukum dengan jelas, tegas, dan tanpa menghasilkan penafsiran ganda. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo sebagai produk hukum daerah perlu disusun dengan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan sesuai dengan aturan bahasa hukum agar dapat

mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi bahasa Indonesia dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, khususnya dalam mendukung kejelasan norma serta kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengandalkan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan bahasa Indonesia yang jelas, konsisten, dan teratur dalam peraturan daerah memiliki dampak yang signifikan pada pemahaman norma hukum di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat. Bahasa hukum yang tepat dapat menghindari ambiguitas, variasi interpretasi, dan kemungkinan sengketa hukum dalam penerapan peraturan daerah. Oleh karena itu, pemanfaatan bahasa Indonesia secara optimal dalam peraturan daerah Provinsi Gorontalo adalah langkah penting untuk memastikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah.

## **LATAR BELAKANG**

Bahasa memiliki fungsi yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hukum pada dasarnya dibuat, disusun, dan disampaikan melalui bahasa. Tanpa adanya bahasa yang terang dan teratur, hukum tidak akan dapat melaksanakan perannya sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, bahasa hukum harus memiliki makna yang jelas, istilah yang tepat, serta menghindari kemungkinan penafsiran ganda agar tujuan hukum, khususnya kepastian hukum, dapat tercapai dengan baik. (Shanty, n.d.)

Dalam sistem hukum di Indonesia yang mengikuti tradisi civil law, kepastian hukum sangat bergantung pada hukum yang tertulis, termasuk undang-undang dan peraturan daerah. Ini berarti setiap hasil hukum harus ditulis dengan bahasa yang jelas, terstruktur, dan mudah dimengerti oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Namun, dalam implementasinya, masih ada banyak undang-undang yang memakai bahasa hukum dengan kalimat yang panjang, rumit, dan cenderung dipengaruhi oleh pola bahasa Belanda, yang menyebabkan kesulitan dalam pemahaman dan berpotensi menghasilkan penafsiran yang berbeda. (Cantika et al., 2024)

Penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, terutama melalui prinsip kejelasan rumusan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap peraturan harus ditulis dengan pemilihan kata, istilah, dan bahasa hukum yang jelas serta mudah dipahami. Meskipun demikian, ketentuan ini masih bersifat teoretis dan belum sepenuhnya dijadikan acuan utama dalam praktik penyusunan peraturan, sehingga sering kali nilai kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi. (Riana & Junaidi, n.d.)

Kondisi ini juga dapat dijumpai dalam peraturan daerah sebagai produk hukum lokal yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di daerah. Peraturan

Daerah Provinsi Gorontalo merupakan instrumen hukum daerah yang sangat penting yang memberikan kepastian hukum kepada penduduk Gorontalo. Namun, jika bahasa yang dipakai dalam peraturan daerah tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar dan terminologi hukum yang jelas, maka tujuan pengaturannya bisa jadi tidak akan tercapai dengan baik dan malah menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. (*Perda No.03 Th 2022 Ttg Prbhan Atas Praturan Daerah Provinsi Gorontalo No 11 Th 2016 Ttg Pmbntukan Dan Susuanan Prngkat Daerah\_0001*, n.d.)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia yang sesuai kaidah adalah alat krusial untuk membantu proses pembuatan undang-undang yang berfokus pada kepastian hukum. Bahasa yang terang, sederhana, dan jelas akan membantu penegak hukum serta masyarakat dalam memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang terkandung dalam suatu peraturan. Di sisi lain, penggunaan bahasa yang kurang tepat bisa memberikan ruang untuk interpretasi yang berlebihan bagi pihak berwenang dan dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. (Riana & Junaidi, n.d.)

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengeksplorasi dengan teliti fungsi bahasa Indonesia dalam peraturan daerah di Provinsi Gorontalo dalam menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk mengkaji bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam peraturan daerah, terutama dari sudut pandang kebakuan, kejelasan definisi, dan kemungkinan adanya tafsir ganda, serta dampaknya terhadap kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis untuk peningkatan mutu bahasa hukum daerah sebagai sarana penegakan dan kepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada penelitian hukum normatif. Pemilihan pendekatan kualitatif disebabkan oleh tujuan penelitian ini untuk mendalami dan menganalisis fungsi bahasa Indonesia dalam peraturan daerah, terutama yang terkait dengan implementasi kepastian hukum, tanpa melibatkan analisis statistik.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan regulasi dan pendekatan konseptual. Pendekatan regulasi dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam undang-undang, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo serta undang-undang yang lebih tinggi. Sementara itu, pendekatan konseptual dipakai untuk memahami ide-ide tentang bahasa hukum, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan bahasa Indonesia dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo pada dasarnya telah mengikuti ketentuan bahasa hukum, yaitu dengan mengedepankan

bahasa yang formal, baku, dan terstruktur. Struktur peraturan daerah tersusun secara logis mulai dari konsiderans, dasar hukum, batang tubuh, sampai penutup, yang mengindikasikan adanya upaya untuk menyajikan norma hukum secara jelas dan teratur. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai sarana utama dalam merumuskan norma hukum sehingga isi peraturan bisa dipahami oleh aparat pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai subjek hukum.

Walaupun begitu, analisis juga memperlihatkan bahwa masih ada beberapa istilah teknis dan frasa administratif yang membutuhkan pemahaman khusus. Penggunaan istilah-istilah tersebut dapat menimbulkan perbedaan tafsir jika tidak diiringi dengan konsistensi makna dan kejelasan konteks. Ini menunjukkan bahwa kualitas bahasa Indonesia dalam peraturan daerah dinilai tidak hanya dari penggunaan bahasa baku, tetapi juga dari ketepatan makna dan hubungan istilah dengan konsep hukum yang diatur.

Pembahasan selanjutnya menggarisbawahi bahwa bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat vital dalam menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum membutuhkan norma yang jelas, tegas, dan tidak bersifat multitafsir. Bahasa Indonesia yang disusun secara jelas dalam peraturan daerah dapat memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, serta wewenang pemerintah daerah dan perangkatnya. Dengan bahasa yang lugas, ruang untuk interpretasi yang berlebihan dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan peraturan daerah dapat diterapkan sesuai dengan tujuan awalnya.

Di samping itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Norma hukum yang ditulis dengan bahasa yang tepat akan mengarahkan tindakan pemerintah daerah agar tetap dalam kerangka hukum. Dengan kata lain, bahasa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan ketidakaturan dalam administrasi pemerintahan.

Konsistensi penggunaan istilah hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo juga merupakan salah satu poin penting dalam pembahasan. Istilah seperti perangkat daerah, urusan pemerintahan, dan kewenangan daerah harus digunakan secara konsisten di seluruh ketentuan peraturan daerah. Ketidakteragaman istilah dapat menyebabkan kebingungan norma dan menyulitkan aparat pemerintah daerah dalam menerapkan peraturan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang konsisten sangat berperan dalam menjaga keselarasan norma hukum, baik di dalam peraturan itu sendiri maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, penerapan bahasa Indonesia yang jelas dan sistematis juga berdampak pada efektivitas pelaksanaan peraturan daerah. Aparat pemerintah daerah akan lebih mudah memahami tugas dan wewenangnya jika norma hukum dirumuskan secara jelas. Di sisi lain, masyarakat juga dapat lebih memahami hak dan kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas bahasa Indonesia dalam peraturan daerah memiliki pengaruh terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, temuan dan pembahasan dalam penelitian ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat, jelas, dan konsisten tidak hanya berfungsi sebagai alat

komunikasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum, menciptakan ketertiban administrasi, serta mendukung tercapainya pemerintahan daerah yang efektif dan berlandaskan hukum.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo pada umumnya telah sesuai dengan kaidah bahasa hukum, yakni bersifat formal, baku, terstruktur, dan sistematis. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai sarana utama dalam perumusan norma hukum sehingga peraturan daerah dapat dipahami oleh aparat pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai subjek hukum. Namun demikian, masih ditemukan penggunaan istilah teknis dan frasa administratif yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran apabila tidak disertai dengan kejelasan konteks dan konsistensi makna.

Lebih lanjut, bahasa Indonesia terbukti memiliki peranan strategis dalam menjamin kepastian hukum, karena kejelasan dan ketegasan bahasa mampu meminimalkan ambiguitas serta variasi interpretasi dalam penerapan peraturan daerah. Konsistensi penggunaan istilah hukum juga menjadi faktor penting dalam menjaga keselarasan norma hukum dan mendukung efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan demikian, penerapan bahasa Indonesia yang tepat, jelas, dan konsisten dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap ketertiban administrasi dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan berlandaskan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cantika, M. S., Herliza, P. D., Perawati, P., & Ananda, N. (2024). Pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap penegakan hukum. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 475–480. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6681>
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (n.d.).
- Riana, R., & Junaidi, M. (n.d.). *Penggunaan bahasa Indonesia baku untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai kepastian hukum*. <https://repository.usm.ac.id/files/proceeding/A021/A021-20190807114245.pdf>
- Shanty, W. (n.d.). *Analisis terhadap fungsi bahasa Indonesia hukum dalam mewujudkan kepastian hukum*. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1917/pdf>